

KESETARAAN GENDER DAN KETERKAITANNYA DENGAN MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI INDONESIA: STUDI KASUS KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU, JAWA TIMUR

Jurnal Pengembangan Kota (2022)

Volume 10 No. 1 (23–35)

Tersedia online di:

<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>

DOI: 10.14710/jpk.10.1.23-35

Ismu Rini Dwi Ari*, Budi Soegiarto Waloejo, Septiana Hariyani

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik,

Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstrak. Kesetaraan gender masuk dalam pilar nomor 5 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai salah satu pendekatan komprehensif untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di suatu wilayah. Tujuan utama penelitian ini untuk menyelidiki keterkaitan antara nilai kesetaraan gender dengan ikatan sosial dalam masyarakat, guna menyusun rekomendasi kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan metode analisis yaitu mengukur kesetaraan gender (*Gender Inequality Index*) dan mengukur dua indeks modal sosial (*rate of participation* dan *kepadatan*), dimana sampel penelitian dibedakan menjadi sampel rumah tangga miskin dan tidak miskin yang terbagi secara proporsional pada total 330 responden. Temuan hasil analisis menunjukkan bahwa rumah tangga miskin memiliki indeks ketimpangan gender yang lebih tinggi daripada rumah tangga tidak miskin, dan rumah tangga miskin memiliki ikatan sosial yang lebih rendah dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Hal ini menyiratkan bahwa masyarakat dengan kesetaraan gender yang baik, dan ikatan sosial yang kuat melalui afiliasi anggota masyarakat dengan lembaga eksisting dapat memberikan peluang lebih besar untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Kesimpulannya, penguatan ikatan sosial di antara anggota masyarakat dapat memperluas perspektif masyarakat tentang betapa pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari tindakan mereka untuk mengatasi kemiskinan.

Kata Kunci : Kesetaraan Gender; Modal Sosial; Rata-Rata Partisipasi; Densitas

[**Title: Gender Equality and its Relationship with Social Capital of the Community Development in Indonesia, Case Study: Bumiaji District Batu City East Java Province**]. *Gender equality was written in pillar number 5 of the Sustainable Development Goals, as one of the comprehensive approaches to alleviating poverty in a region. The main aim of this research was to scrutinize the relationship between the value of gender equality and social ties in society and it would come out with public policy recommendations for poverty eradication. The research used two analysis methods, namely measuring gender inequality index (GII) and two social capital indexes (rate of participation and density), whereby research samples were differentiated into poor and non-poor households that were proportionately distributed for a total of 330 respondents. Research findings indicated that poor households have higher GII than non-poor households, and poor households have lower social ties than non-poor households. It implied that a society with good value of gender equality, and strong social ties through their memberships with an existing institution, might have a higher opportunity to fulfill higher society's welfare. In conclusion, strengthening social ties among society members could broaden society's perspective on how important gender equality was as part of their action in dealing with poverty.*

Keywords: Gender Equality; Social Capital; Rate of Participation; Density

Cara Mengutip: Ari, Ismu Rini Dwi., Waloejo, Budi Soegiarto., & Hariyani, Septiana. (2022). Kesetaraan Gender dan Keterkaitannya dengan Modal Sosial dalam Pembangunan Masyarakat di Indonesia: Studi Kasus Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Jawa Timur. *Jurnal Pengembangan Kota*. Vol 10 (1): 23-35. DOI: 10.14710/jpk.10.1.23-35

1. PENDAHULUAN

Suatu pembangunan tidak lepas dari pengaruh sumber daya manusia sebagai pelaku

pembangunan, dimana pembangunan manusia perlu ditinjau dari kualitas hidup dan potensi manusia di suatu negara (Badan Pusat Statistika, 2018). Keberhasilan suatu pembangunan yang

dilakukan oleh pemerintah dan swasta dipengaruhi oleh seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan (United Nation Development Programme, 2016). Dalam kata lain, pencapaian kesetaraan gender yang diperlukan adalah kesempatan atau peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Menurut Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing sesuai pada instruksi presiden kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Kesetaraan gender menjadi fokus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pilar 5, yaitu pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk akses universal terhadap informasi dan teknologi, sampai dengan kebijakan publik yang pro-perempuan.

Pemberdayaan perempuan ditujukan untuk memberikan kekuatan bagi perempuan untuk berbicara dalam pengambilan keputusan, kekuatan dalam kegiatan ekonomi, dan kekuatan untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada (Rahman, 2013). Hal ini sesuai dengan tujuan pengukuran *Gender Inequality Index* (GII) yang ingin mengatasi kondisi ketimpangan gender. Pandangan masyarakat bahwa perempuan memiliki keterbatasan dalam segala hal dibandingkan dengan laki-laki (UN Women, 2014) merupakan catatan khusus dalam upaya pencapaian kesetaraan gender itu sendiri. Secara lebih khusus, kesetaraan gender juga merupakan masalah yang terjadi di Indonesia, dimana Indonesia berada pada peringkat 85 dari 153 negara (0,70) dan angka tersebut tidak berubah sejak tahun 2018 sebagaimana dikemukakan dalam Laporan The

Global Gender Gap Index 2020, World Economic Forum (Wulandari, 2020).

Kesetaraan gender yang baik antara laki-laki dan perempuan terjadi jika dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berekonomi dilakukan secara adil tanpa adanya perbandingan gender (Badan Pusat Statistika Kota Batu, 2019a). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat perbedaan hak penggunaan fasilitas antara laki-laki dan perempuan. Hal ini yang menyebabkan adanya ketimpangan sehingga perempuan hidup lebih tertinggal dalam memperoleh kualitas hidup yang lebih baik (Bangun, 2021).

Modal sosial yang merata antara laki-laki dan perempuan merupakan aset bagi individu karena data memberikan akses ke sumber daya dan fasilitas (Muñoz-Goy, 2013). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan modal sosial adalah kebiasaan, kedudukan (peranan aktor), pendidikan, kelas sosial ekonomi dan nilai-nilai personal (Fathy, 2019). Modal sosial yang baik dapat meningkatkan taraf hidup seseorang melalui hubungan yang baik. Sehingga modal sosial ini dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat baik laki-laki atau perempuan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, pendidikan maupun kesehatan (Putnam, 2000). Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan TPB yang harus dicapai yaitu pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender.

Program kesetaraan gender merupakan hal yang penting dalam pengembangan pembangunan daerah. Kebijakan publik sudah tertuang dalam perarutan dan perundangan di Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain tercantum dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa partisipasi politik dalam mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

ISSN 2337-7062 © 2022

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>). – see the front matter © 2022

*email: dwiari@ub.ac.id

Submitted 21 Februari 2022, accepted 30 Juni 2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah menyebutkan bahwa pemerintah membuat strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada Kecamatan Bumiaji Kota Batu Provinsi Jawa Timur, untuk lebih mampu memberikan potret secara detail mengenai isu gender dan modal sosial pada wilayah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pembangunan yang pesat. Berdasarkan Kecamatan Bumiaji Dalam Angka Tahun 2018, diketahui jumlah penduduk laki-laki sebanyak 29.246 orang atau sekitar 51% dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 28.876 orang atau sekitar 49% (Badan Pusat Statistika, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi jumlah, penduduk perempuan di Kecamatan Bumiaji memiliki kesempatan yang lebih besar dalam kegiatan pembangunan karena jumlah penduduk perempuan yang hampir sebanding dengan jumlah laki-laki.

Tujuan utama penelitian ini untuk menyelidiki keterkaitan antara nilai kesetaraan gender dengan ikatan sosial dalam masyarakat, guna menyusun rekomendasi kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan pertama penelitian adalah mengukur indeks kesetaraan gender berdasarkan *Gender Inequality Index* (GII) yang meliputi tiga dimensi. Dan tujuan kedua adalah memahami struktur sosial masyarakat melalui pendekatan *Social Network Analysis* (SNA) dengan pengukuran 2 indeks modal sosial (Ari, Hasyim, Pratama, Helmy, & Sheilla, 2017). Penelitian pada tingkat kecamatan dengan unit analisis desa/kelurahan akan memberikan kontribusi penting pada upaya penyusunan kebijakan publik pencapaian kesetaraan gender yang selama ini masih dilakukan di level meso (kota/kabupaten) ataupun makro (nasional/internasional), yang sangat memungkinkan terjadinya generalisasi yang terlalu lebar dan memunculkan bias pada kebijakan pembangunan yang tersusun.

2. METODE

2.1. Pengumpulan data dan sampel

Studi ini merupakan penelitian empiris dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara survei primer dan survei sekunder. Survei primer

dilakukan dengan cara mendistribusikan kuisioner dan observasi lapangan. Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi literatur dan survei ke instansi-instansi terkait. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kecamatan Bumjai dalam satuan Kepala Keluarga (KK). Sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin sehingga didapat jumlah sampel sebesar 330 KK sebagai representatif rumah tangga (RT) yang ada, yang selanjutnya didistribusikan secara proporsional ke dalam 9 desa. Selanjutnya, sampel yang telah diproporsional ke setiap desa dibagi menjadi sampel rumah tangga miskin dan tidak miskin berdasarkan data jumlah rumah tangga miskin (rumah tangga penerima beras miskin) setiap desa. Secara lebih detail, penelitian ini mengasumsikan rumah tangga penerima program beras miskin dalam klasifikasi rumah tangga miskin, dan sebaliknya.

2.2. Gender Inequality Index (GII)

GII atau indeks ketidaksetaraan gender merupakan analisis untuk mengukur ketidaksetaraan gender yang dikeluarkan oleh *United Nation Development Programme* (2016). Pada penelitian ini pengumpulan data untuk analisis GII dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada sampel terpilih berupa data atribut KK, dan pengolahan datanya dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel–Office 365 (lisensi Universitas Brawijaya). Perhitungan GII memiliki 3 dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan angkatan kerja/pasar tenaga kerja. Dimensi kesehatan diukur melalui rasio angka kematian ibu melahirkan dan tingkat kesuburan remaja. Dimensi pemberdayaan merepresentasikan persentase penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki posisi di parlemen, dan memiliki pendidikan minimal SMA. Dimensi partisipasi angkatan kerja diukur melalui partisipasi perempuan di dunia kerja. Nilai GII bervariasi antara 0–1, dimana nilai 0 menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sementara nilai 1 menunjukkan terjadinya ketimpangan atau ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan pada semua dimensi. Dengan demikian, masyarakat dengan nilai GII semakin rendah mempunyai peluang lebih baik untuk terwujudnya kesejahteraan dalam suatu wilayah

tersebut, dikarenakan adanya kondisi yang lebih setara diantara laki-laki dan perempuan pada semua dimensi kehidupan. Secara lebih detail desain GII dalam penelitian ini terdapat pada Tabel 1.

2.3. Social Network Analysis (SNA)

Metode pendekatan SNA dalam penelitian ini, ditujukan sebagai alat analisis untuk memetakan struktur sosial pada suatu masyarakat melalui konektivitas antara anggota masyarakat dalam keanggotaannya pada suatu lembaga dalam suatu jaringan kerja dengan studi kasus masyarakat di Kecamatan Bumijai Kota Batu (Ari, Waloejo, & Hariyani, 2019). Persyaratan jenis data yang digunakan pada SNA adalah data afiliasi keanggotaan responden terhadap kelembagaan yang diikuti (Ari, Hariyani, & Waloejo, 2021). Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan

kuisisioner kepada sampel terpilih yang kemudian dianalisis menggunakan bantuan aplikasi UCINET 6.742. Ikatan sosial dalam kelompok masyarakat dapat diketahui dari keikutsertaan masyarakat dalam kelembagaan tertentu, semakin aktif masyarakat dalam suatu kelembagaan maka peluang untuk mendapatkan informasi lebih besar (Putnam, 1993). Pada penelitian ini, indeks modal sosial yang diukur dengan pendekatan SNA terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *Rate of Participation* (RoP) dan densitas, tercantum pada Tabel 1. Kedua pendekatan tersebut mengacu pada teori dari Wasserman dan Fraust (1994), yang selanjutnya dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu tinggi, sedang, rendah (Ari dkk., 2017). Asumsi dasar pada penelitian ini bahwa masyarakat dengan tingkat partisipasi dan densitas yang semakin tinggi mempunyai peluang lebih tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada wilayah terkait.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Tujuan	Metode	Variabel	Indikator
Mengukur tingkat kesetaraan gender masyarakat Kecamatan Bumijai	<i>Gender Inequality Index</i> (GII)	Kesehatan reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kematian ibu (MMR) • Angka kelahiran pada remaja (ABR)
		Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penduduk laki-laki dan perempuan dengan pendidikan minimal SMA (SE) • Persentase penduduk laki-laki dan perempuan yang duduk di parlemen (PR)
		Partisipasi Angkatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Angka angkatan kerja laki-laki dan perempuan yang berada pada usia kerja (LFPR)
Memetakan struktur sosial masyarakat Kecamatan Bumijai	<i>Social Network Analysis</i> (SNA)	Tingkat partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah responden • Jumlah kelembagaan Kecamatan • Keikutsertaan masyarakat dalam kelembagaan
		Densitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kerapatan hubungan antar anggota lembaga`

3. HASIL DAN DISKUSI

Kecamatan Bumijai merupakan satu dari 3 kecamatan di Kota Batu, Jawa Timur Indonesia yang memiliki sembilan desa yaitu Pandanrejo, Bumijai, Bulukerto, Gunungsari, Puntan, Tulungrejo, Sumbergondo, Giripurno dan Sumber Brantas. Secara geografis, Kecamatan Bumijai terletak di daerah perbukitan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bumijai sebanyak 207.490 jiwa (Badan Pusat Statistika Kota Batu, 2019b).

3.1. Kondisi Partisipasi Masyarakat Kota Batu

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari BPS Kota Batu Tahun 2019, kondisi partisipasi

masyarakat Kota Batu tahun 2017–2019 dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan masa studi selama 12 tahun, sebagaimana tercantum pada Tabel 2. Secara umum data statistik menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Batu semakin turun sejalan semakin lamanya masa studi. Dengan kata lain, bahwa jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan dasar (SD) ada pada persentase tertinggi, yang selanjutnya semakin turun pada tingkat penedidikan menengah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA). Sesungguhnya menurut dalam Kerangka Pembangunan Pendidikan (BAPPENAS, 2016), standar lama mengenyam pendidikan penduduk Indonesia secara nasional ditetapkan selama 12 tahun (SD – SMP – SMA).

Tabel 2. Angka Partisipasi Murni Kota Batu Tahun 2017 – 2019

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (%)		
	2017	2018	2019
Sekolah Dasar (7-12 tahun)	100,00	98,17	95,99
Laki-laki	100,00	99,47	93,97
Perempuan	100,00	96,92	97,86
Sekolah Menengah Pertama (13-15 tahun)	79,06	80,72	84,50
Laki-laki	86,09	84,52	92,33
Perempuan	71,89	77,36	75,82
Sekolah Menengah Atas (16-18 tahun)	68,75	71,04	73,89
Laki-laki	59,97	70,55	70,36
Perempuan	77,68	71,67	78,51

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Batu, (2019b)

Data series 3 tahun pada Tabel 2 menunjukkan kecenderungan angka partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan SD mengalami penurunan, kecuali pada jenis kelamin perempuan yang mengalami sedikit persentase kenaikan antara tahun 2018–2019 (+0,94%). Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMP, secara umum penduduk mempunyai kecenderungan kenaikan angka partisipasi, kecuali pada jenis kelamin perempuan yang justru mengalami penurunan antara tahun 2018–2019 (-1,54%), setelah mengalami kenaikan angka persentasi secara cukup signifikan antara tahun 2017–2018 (+5,47%). Pada jenjang pendidikan SMA, secara umum kecenderungan peningkatan angka partisipasi juga terjadi, khususnya pada jenis kelamin perempuan antara tahun 2018–2019 (+6,84%).

Apabila diperhatikan berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa pada jenjang pendidikan SD dan SMA, prosentase siswa perempuan lebih banyak daripada siswa laki-laki, dan pengecualian terjadi pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) dengan prosentase siswa laki-laki lebih tinggi dibanding siswa perempuan. Secara keseluruhan, Tabel 2 menunjukkan bahwa 78,51% perempuan di Kota Batu pada tahun 2019 telah mengenyam pendidikan SMA, sebagai indikasi yang cukup baik terkait akses pendidikan bagi laki-laki dan perempuan di Kota Batu.

3.2. Gender Inequality Index (GII)

Ketidaksetaraan gender merupakan isu penting yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat

secara keseluruhan, khususnya penduduk perempuan. Berdasarkan pengukuran GII atau Indeks Ketimpangan Gender oleh United Nation Development Programme (2016), menunjukkan bahwa ada 2 (dua) indikator untuk menghitung dimensi kesehatan reproduksi yaitu Rasio Kematian Ibu (AKI) dan Rasio Kelahiran Remaja (ABR). Rerata Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kelahiran Remaja (AFR) disebut *Geometric mean Female* (GF). Dimensi kedua adalah dimensi pemberdayaan, mengukur pendidikan minimum pada penduduk laki-laki (SEfM) dan laki-laki atau perempuan yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (parlemen) (PRM). Rata-rata geometrik laki-laki (GM) adalah rata-rata pendidikan minimum pada penduduk perempuan atau laki-laki (SEfM) dan laki-laki yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (parlemen) (PRM). Dimensi terakhir adalah dimensi angkatan kerja atau pasar tenaga kerja, dengan 1 (satu) indikator yaitu jumlah pasar tenaga kerja. Terdapat 5 (lima) langkah untuk menghitung tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Bumiaji. Pertama mengukur nilai indeks perempuan (Gf) dan nilai indeks laki-laki (Gm). Langkah kedua, mengukur agregasi harmonik kedua nilai indeks perempuan (Gf) dan nilai indeks laki-laki (Gm). Selanjutnya, yang ketiga adalah menghitung setiap dimensi. Langkah keempat adalah penjumlahan indeks dimensi. Langkah terakhir adalah mengukur nilai indeks ketidaksetaraan gender dengan membandingkan antar indeks.

a. Nilai Indeks Wanita (Gf) dan Nilai Indeks Laki-laki (Gm)

Indeks perempuan dan indeks laki-laki merupakan langkah awal untuk mengukur indeks ketidaksetaraan gender. Tabel 3 merupakan hasil penghitungan nilai indeks perempuan (Gf) dan nilai indeks laki-laki (Gm) masing-masing desa di Kecamatan Bumiaji. Berdasarkan Tabel 3, untuk sampel RT miskin, Desa Tulungrejo memiliki nilai indeks perempuan (Gf) terendah (0,12553), sementara Desa Punten memiliki nilai indeks perempuan tertinggi (Gm) (0,20927). Nilai indeks laki-laki (Gm) tertinggi terdapat di Desa Pandanrejo (1,12626), sementara itu nilai indeks laki-laki (Gm) terendah sebesar (0,77560) ditemukan di Desa Sumbergondo. Nilai indeks perempuan (Gf) sampel RT tidak miskin menunjukkan bahwa Desa Giripurno memiliki nilai terendah (0,10509) dan

Desa Tulungrejo memiliki nilai tertinggi (0,16120). Nilai indeks laki-laki (Gm) pada sampel RT tidak miskin dengan nilai terendah terdapat pada Desa Gunungsari (0,57038), sementara nilai tertinggi dijumpai di Desa Sumber Brantas (1,04228). Nilai Gf antara sampel RT miskin dan tidak miskin menunjukkan bahwa 7 dari 9 desa miskin memiliki Gf lebih tinggi dibanding desa tidak miskin. Sementara itu, pola yang sama juga ditemui pada perbandingan nilai Gf sampel RT miskin dan tidak miskin (8 dari 9 desa). Secara keseluruhan baik pada sampel RT miskin maupun tidak miskin, didapati indikasi bahwa nilai Gm lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Gf.

b. Agregasi Harmonic Nilai Indeks Wanita (Gf) dan Nilai Indeks Pria (Gm)
 Fungsi hitung agregasi harmonik adalah untuk mengetahui rata-rata indeks gender yang merata. Berdasarkan Tabel 4 agregasi harmonik, untuk

sampel RT miskin nilai agregasi harmonik (Gf, Gm) terendah ditemui terjadi di Desa Tulungrejo (0,21834), sementara nilai tertinggi terjadi di Desa Pandanrejo (0,35248). Pada sampel RT tidak miskin, agregasi harmonik (Gf, Gm) terendah ditemukan terdapat pada Desa Giripurno, dan sebaliknya nilai tertinggi terdapat pada Desa Pandanrejo 0,30358. Perbandingan antara nilai agregasi harmonik sampel RT miskin dan tidak miskin menunjukkan bahwa 7 dari 9 desa pada sampel RT miskin memiliki nilai agregasi harmonik (Gf, Gm) lebih tinggi dibandingkan dengan sampel RT tidak miskin.

c. Perhitungan Setiap Dimensi
 Tiga dimensi indeks ketidaksetaraan gender (dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja) digunakan untuk mengetahui indeks setiap dimensi pada langkah 4.

Tabel 3. Nilai Gf dan Gm Setiap Desa

Desa	Sampel RT Miskin		Sampel RT Tidak Miskin	
	Gf	Gm	Gf	Gm
Bulukerto	0,17145	1,04161	0,15134	0,89648
Bumiaji	0,17034	1,02965	0,11938	0,94748
Giripurno	0,15228	0,95453	0,10509	0,83212
Gunungsari	0,15270	0,93692	0,17743	0,57038
Pandanrejo	0,20894	1,12626	0,19927	0,63710
Punten	0,20927	1,08908	0,15949	1,03324
Sumber Brantas	0,15040	0,80962	0,12910	1,04228
Sumbergondo	0,21674	0,77560	0,14763	0,75928
Tulungrejo	0,12553	0,83749	0,16120	0,79654

Tabel 4. Agregasi Harmonik Nilai Gf dan Nilai Gm Setiap Desa

Desa	Sampel RT Miskin	Sampel RT Tidak Miskin
	HARM (Gf, Gm)	HARM (Gf, Gm)
Bulukerto	0,29444	0,25896
Bumiaji	0,29231	0,21205
Giripurno	0,26265	0,18661
Gunungsari	0,26260	0,27066
Pandanrejo	0,35248	0,30358
Punten	0,35107	0,27633
Sumber Brantas	0,25368	0,22974
Sumbergondo	0,33880	0,24719
Tulungrejo	0,21834	0,26814

Tabel 5. Nilai Pada Tiap Dimensi

Desa	Sampel RT Miskin			Sampel RT Tidak Miskin		
	Pemberdayaan	Pasar Tenaga Kerja	Kesehatan Reproduksi	Pemberdayaan	Pasar Tenaga Kerja	Kesehatan Reproduksi
Bulukerto	0,53243	0,63889	0,73570	0,52844	0,41912	0,70412
Bumiaji	0,56037	0,63571	0,62127	0,50189	0,50667	0,67150
Giripurno	0,40536	0,66016	0,66984	0,42695	0,42541	0,63868
Gunungsari	0,41917	0,60625	0,68464	0,15071	0,53431	0,65076
Pandanrejo	0,60114	0,75882	0,71320	0,55670	0,18683	0,71320
Punten	0,94606	0,45143	0,66667	0,71986	0,50000	0,66667
Sumber Brantas	0,51726	0,33947	0,64434	0,75461	0,48462	0,64434
Sumbergondo	0,45094	0,40000	0,68898	0,34217	0,39957	0,76726
Tulungrejo	0,62418	0,29006	0,65076	0,46442	0,37170	0,65076

Tabel 5 menunjukkan indeks kesehatan reproduksi, indeks pemberdayaan, dan indeks pasar tenaga kerja bernilai positif dan berkisar antara (0,29006) sampai dengan (0,94606). Nilai pemberdayaan tertinggi pada sampel RT miskin ditemui di Desa Punten (0,94606), dan sebaliknya nilai pemberdayaan terendah terjadi di Desa Giripurno (0,40536). Nilai pemberdayaan tertinggi pada sampel RT tidak miskin terlihat terdapat pada Desa Sumber Brantas (0,75461) sementara itu nilai terendah dapat dilihat pada Desa Gunungsari (0,15071). Nilai dimensi pemberdayaan yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat tinggi disertai dengan partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam parlemen. Menurut penelitian (Ari dkk., 2021), masyarakat dengan tingkat partisipasi yang tinggi memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Sehingga ketika kualitas SDM sudah baik, maka diasumsikan bahwa upaya pencapaian kesetaraan gender di Kecamatan Bumiaji akan lebih mudah untuk dilakukan. Pada sampel RT miskin, nilai tertinggi dimensi pasar kerja terindikasi terjadi di Desa Pandanrejo (0,75882), sementara nilai terendah dimensi pasar tenaga kerja ditemui terdapat di Desa Tulungrejo (0,29006). Dimensi pasar tenaga kerja pada RT tidak miskin, nilai tertinggi ditemukan pada Desa Bumiaji (0,50667) dan sebaliknya nilai terendah terdapat di Desa Pandanrejo (0,18683). Nilai dimensi pasar tenaga kerja yang tinggi menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan seimbang. Nilai kesehatan reproduksi sampel RT miskin

dengan nilai tertinggi terdapat di Desa Bulukerto (0,73570), sementara nilai kesehatan reproduksi terendah terjadi di Desa Tulungrejo (0,62127). Dimensi kesehatan reproduksi pada sampel RT tidak miskin nilai tertinggi terdapat di desa Sumbergondo (0,76726). Nilai indeks kesehatan reproduksi yang tinggi menunjukkan bahwa perempuan di Desa Sumbergondo mempunyai kualitas kesehatan reproduksi yang baik.

d. Indeks setiap Dimensi

Semua dimensi pada indeks ketidaksetaraan gender ditambahkan untuk mendapatkan nilai akhir GII. Tiga dimensi GII kemudian dirata-ratakan secara geometris. Berdasarkan Tabel 6 penjumlahan semua dimensi menunjukkan bahwa pada sampel RT miskin, Desa Pandanrejo memiliki nilai tertinggi (0,68777) sementara Desa Sumber Brantas memiliki nilai terendah (0,48366). Pada sampel RT tidak miskin, nilai tertinggi terdapat di Desa Punten (0,62140) sebaliknya nilai terendah ditemukan pada Desa Gunungsari (0,37421). Desa dengan nilai indeks dimensi yang lebih tinggi berarti desa tersebut mempunyai kondisi kesetaraan gender yang lebih baik.

e. Gender Inequality Index (GII)

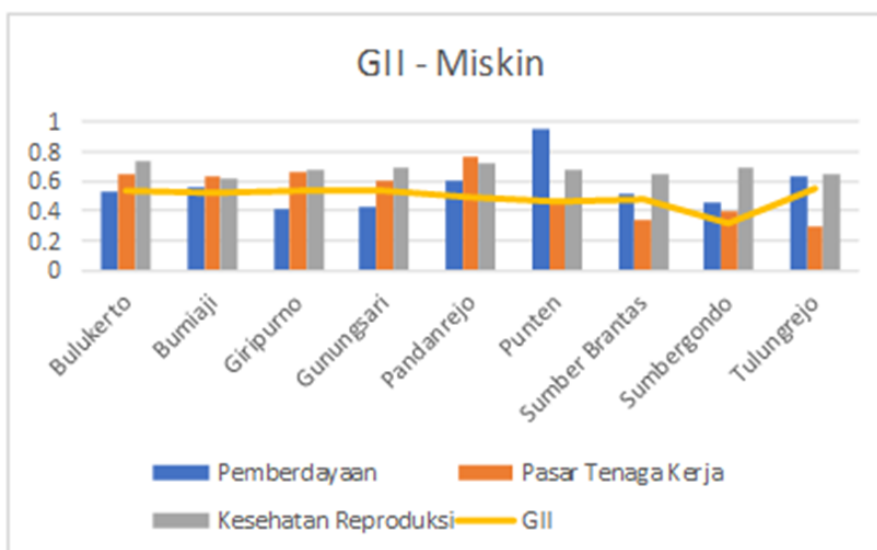
Indeks ketimpangan gender (GII) dapat menggambarkan kerugian/keuntungan dalam aspek pembangunan yang diakibatkan oleh tinggi atau rendahnya kesetaraan gender. GII memiliki range nilai antara 0 (kesetaraan gender) hingga 1 (ketidaksetaraan gender).

Tabel 6. Jumlah Indeks Dimensi Gfm

Desa	Sampel RT Miskin Gfm	Sampel RT Tidak Miskin Gfm
Bulukerto	0,63018	0,53826
Bumiaji	0,60488	0,55478
Giripurno	0,56384	0,48770
Gunungsari	0,55826	0,37421
Pandanrejo	0,68777	0,42017
Punten	0,65787	0,62140
Sumber Brantas	0,48366	0,61765
Sumbergondo	0,49903	0,47162
Tulungrejo	0,49024	0,48251

Tabel 7. Nilai Gender Inequality Index (GII)

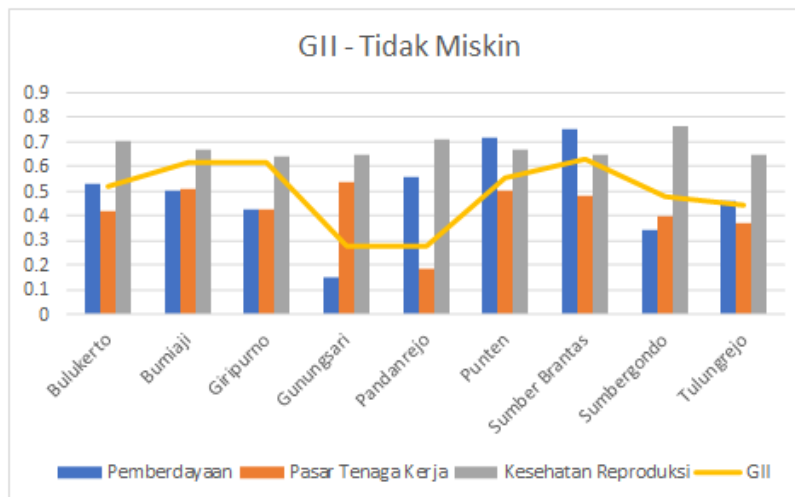
Village	Sampel RT Miskin GII	Sampel RT Tidak Miskin GII
Bulukerto	0,53277	0,51889
Bumiaji	0,51674	0,61779
Giripurno	0,53417	0,61738
Gunungsari	0,52960	0,27672
Pandanrejo	0,48750	0,27747
Punten	0,46635	0,55531
Sumber Brantas	0,47551	0,62804
Sumbergondo	0,32109	0,47587
Tulungrejo	0,55463	0,44429



Gambar 1. Gender Inequality Index Sampel Rumah Tangga Miskin

Gambar 1 menunjukkan kompilasi akhir nilai GII dari ketiga dimensi pada sampel RT miskin di setiap desa. Pada Tabel 7, Desa Sumbergondo memiliki nilai indeks ketimpangan gender terendah (0,32109) artinya Desa Sumbergondo memiliki kesetaraan gender yang lebih baik dibandingkan

desa lainnya. Nilai indeks ketimpangan gender tertinggi terjadi di Desa Tulungrejo (0,55463) artinya Desa Tulungrejo memiliki kesetaraan atau ketimpangan gender yang lebih buruk dibanding desa yang lainnya.



Gambar 2. Gender Inequality Index Sampel Rumah Tangga Tidak Miskin

Gambar 2 menunjukkan kompilasi setiap komponen di setiap desa untuk sampel RT tidak miskin. Desa Gunungsari memiliki nilai indeks ketimpangan gender terendah (0,27672) artinya Desa Gunungsari memiliki kesetaraan gender yang lebih baik dibandingkan desa lainnya. Nilai indeks ketimpangan gender tertinggi ditemukan terjadi di Desa Sumber Brantas (0,62804), artinya Desa Sumber Brantas memiliki kesetaraan atau ketimpangan gender yang lebih buruk dibanding desa lainnya. Tingginya nilai ketimpangan gender membuat kesejahteraan perempuan juga rendah. Selain itu, ketimpangan gender lebih jauh dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan demikian, peningkatan kualitas perempuan akan dapat mempengaruhi kebaikan kualitas hidup generasi di masa mendatang.

Gambar 1 dan 2 secara umum mengindikasikan bahwa nilai ketidaksetaraan gender di Kecamatan Bumiaji lebih disebabkan oleh masih tingginya ketidaksetaraan gender dari dimensi kesehatan reproduksi, serta dimensi pemberdayaan. Dengan demikian, terdapat dua hal penting untuk diperhatikan yaitu kesehatan secara fisik dan mental dari ibu dan perempuan usia produktif, serta akses ke pendidikan bagi perempuan. Angka kematian ibu mencerminkan kesejahteraan perempuan yang diberikan oleh masyarakat atau pemerintah selama persalinan, dimana risiko kematian saat melahirkan yang tinggi banyak terjadi di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Situasi ini dapat dikurangi dengan

memberikan pendidikan dasar, akses ke kontrasepsi, penyediaan layanan kesehatan antenatal, dan penolong persalinan yang terampil. Selanjutnya, pemberdayaan perempuan dalam partisipasi politik, memfasilitasi keterlibatan langsung perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan dapat menunjukkan kemampuan perempuan dalam politik, organisasi atau pemerintahan akan menjadi lebih terbuka peluangnya ketika perempuan memiliki akses ke kualitas pendidikan yang lebih tinggi.

3.3. Social Network Analysis (SNA)

Dua indeks modal sosial melalui pendekatan SNA yang digunakan untuk mengukur kondisi struktur sosial masyarakat di Kecamatan Bumiaji adalah tingkat partisipasi (RoP) dan densitas. Pengukuran tingkat partisipasi (RoP) dan densitas ditujukan untuk mengetahui aktivitas masyarakat dalam berpartisipasi pada lembaga-lembaga yang ada di sekitar tempat tinggal mereka dan kerapatan hubungan sosial diantara anggota masyarakat melalui keanggotaan pada lembaga eksisting, sebagai salah satu media untuk memperoleh dan terjadinya arus transformasi informasi, pengetahuan, dan sumber daya lainnya diantara anggota masyarakat dalam jaringan kerja spasial wilayah kehidupan dimana mereka bertempat tinggal. Kedua pengukuran indeks modal sosial tersebut juga dibedakan dalam sampel rumah tangga miskin dan tidak miskin, guna mendapatkan informasi lebih detail dan representatif akan kondisi struktur sosial masyarakat di wilayah studi.

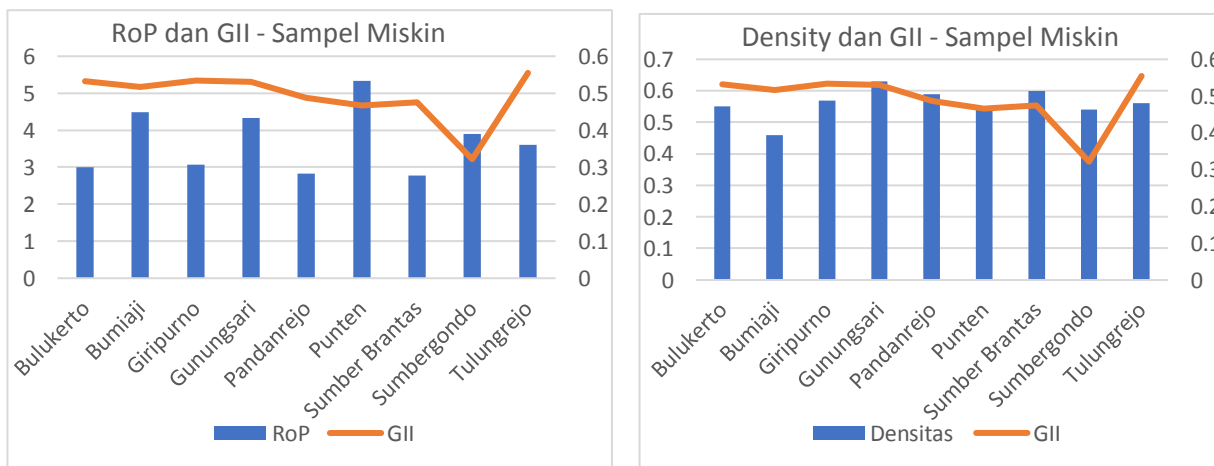
Tabel 8. Nilai Modal Sosial di Kecamatan Bumiaji

Desa	Sampel RT Miskin		Sampel RT Tidak Miskin		Sampel RT Miskin		Sampel RT Tidak Miskin	
	RoP	Klasifikasi	RoP	Klasifikasi	Densitas	Klasifikasi	Densitas	Klasifikasi
Bulukerto	3,00	Rendah	4,59	Sedang	0,55	Sedang	0,98	Tinggi
Bumiaji	4,48	Sedang	5,14	Sedang	0,46	Sedang	0,65	Sedang
Giripurno	3,06	Rendah	6,21	Sedang	0,57	Sedang	0,75	Tinggi
Gunungsari	4,33	Sedang	6,69	Sedang	0,63	Sedang	0,97	Tinggi
Pandansari	2,83	Rendah	7,30	Sedang	0,59	Sedang	0,80	Tinggi
Punten	5,33	Sedang	6,20	Sedang	0,54	Sedang	1,00	Tinggi
Sumberbrantas	2,77	Rendah	5,53	Sedang	0,60	Sedang	1,00	Tinggi
Sumbergondo	3,90	Sedang	4,36	Sedang	0,54	Sedang	0,90	Tinggi
Tulungrejo	3,61	Sedang	5,15	Sedang	0,56	Sedang	0,62	Sedang

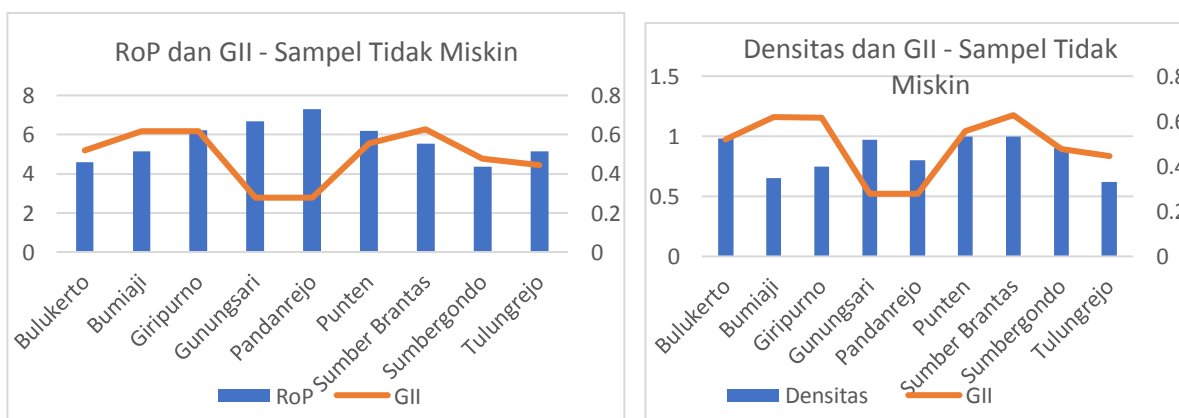
Tabel 8 menunjukkan hasil pengukuran modal sosial pada Kecamatan Bumiaji yang terbagi pada indeks rata-rata partisipasi (RoP) dan densitas. Nilai RoP menunjukkan rata-rata jumlah lembaga yang diikuti oleh masyarakat di Kecamatan Bumiaji, untuk sampel RT tidak miskin paling banyak berada di Desa Pandansari sebanyak 7 lembaga dan untuk sampel RT tidak miskin paling banyak berada di Desa Punten sebanyak 5 institusi. Hasil pengukuran RoP menunjukkan bahwa rata-rata partisipasi atau keikutsertaan menjadi anggota pada lembaga yang eksis di wilayah studi, kelompok sampel RT tidak miskin memiliki rata-rata partisipasi lebih tinggi (9/9 berada pada level sedang) dibandingkan dengan sampel RT miskin (partisipasi pada tingkat rendah : sedang = 4 : 5). Sampel RT miskin dengan nilai RoP terendah ditemukan pada Desa Sumberbrantas sebesar 2,77, berarti rata-rata masyarakat mengikuti kelembagaan antara 2–3 institusi. Sedangkan nilai tertinggi RoP pada sampel RT miskin terdapat di Desa Punten (5,33) dimana rata-rata rumah tangga menjadi anggota pada 5–6 kelompok masyarakat yang ada. Sementara itu, pada sample RT tidak miskin, rata-rata keanggotaan pada lembaga eksisting adalah 4–5 lembaga, dan tertinggi adalah sebanyak 7–8 institusi.

Secara keseluruhan nilai densitas pada penduduk sampel RT tidak miskin memiliki keeratan ikatan sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk sampel RT miskin. Nilai densitas tinggi pada sampel RT tidak miskin terdapat pada 7 dari 9 desa, sedangkan nilai densitas sedang ditemukan pada keseluruhan desa pada sample RT miskin. Pada sampel RT miskin nilai densitas tertinggi terdapat di Desa Gunungsari sebesar 0,63 dan terendah di Desa Bumiaji sebesar 0,46.

Modal sosial merupakan salah satu bentuk modal yang unik yang membuatnya berbeda dari modal-modal yang lain, dimana modal sosial melekat pada struktur hubungan antar individu-individu, dan diantara individu-individu (Coleman, 1988), yang akan semakin tinggi manfaatnya ketika difungsikan sebagai produk investasi masyarakat melalui waktu dan usaha dalam jangka waktu tertentu (Ostrom & Ahn, 2003). Berdasarkan hasil perhitungan RoP dan densitas di Kecamatan Bumiaji dapat diketahui bahwa tingkat RoP dan densitas pada kelompok masyarakat miskin lebih rendah dibanding dengan kelompok masyarakat tidak miskin. Kejadian pada wilayah studi membuktikan bahwa ikatan sosial yang tinggi–ditunjukkan dengan nilai rata-rata partisipasi dan densitas yang tinggi, memberikan peluang bagi anggota masyarakat untuk terjalannya transfer informasi, pengetahuan maupun sumber daya yang lebih baik, dimana hubungan ikatan sosial yang lebih kuat tersebut membuka peluang lebih besar bagi penduduk untuk mendapatkan kesempatan lebih tinggi dalam mencapai kesejahteraan hidup (Putnam, 2000). Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak miskin akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat melalui pertukaran arus informasi, pengetahuan dan sumber daya dari lembaga yang mereka ikuti secara lebih lancar. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Ari dkk., 2019), bahwa jejaring sosial masyarakat yang tinggi memberikan kemungkinan bagi masyarakat untuk lebih mudah berinteraksi dan berbagi informasi/ pengetahuan/ sumber daya antar dan diantara anggota masyarakat.



Gambar 3. RoP, Density and GII Sampel Rumah Tangga Miskin



Gambar 4. RoP, Density and GII Sampel Rumah Tangga Tidak Miskin

Gambar 3 dan 4 menunjukkan hubungan antara skor GII dan SNA pada desa-desa di Kecamatan Bumijati pada kategori sampel RT miskin dan tidak miskin. Skor GII yang tinggi diasosiasikan dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada suatu lembaga/institusi. Pada kelompok rumah tangga miskin (Gambar 3), Desa Bulukerto mempunyai skor GII tinggi dan diikuti dengan nilai RoP yang rendah. Lebih lanjut, pada Gambar 4, nilai tertinggi GII (di Desa Pandarejo–grafik garis) diikuti oleh rendahnya nilai RoP (ditunjukkan melalui grafik batang pada Desa Pandanrejo). Tinggi rendahnya nilai RoP ditunjukkan oleh jumlah tinggi rendah partisipasi rumah tangga/ keluarga sebagai anggota atau mengikuti suatu kelembagaan. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam suatu institusi/ lembaga–diartikan dari sedikit dan banyaknya keikutsertaan anggota masyarakat dalam suatu kelembagaan, membuka peluang rumah tangga/ keluarga khususnya wanita untuk mendapatkan informasi atau ketrampilan

yang lebih bagus, sehingga mereka pun mempunyai peluang lebih besar untuk meningkatkan kompetensi diri mereka baik secara individu maupun secara kelompok.

4. KESIMPULAN

Ketimpangan gender adalah ketidaksetaraan distribusi kekayaan, kekuasaan, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Metode Gender inequality Index (GII) merupakan alat untuk mengukur ketimpangan gender melalui tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan dan dimensi partisipasi angkatan kerja. Tujuan pertama pada penelitian ini adalah mengukur tingkat indeks ketimpangan gender di Kabupaten Bumaji. Secara keseluruhan, temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga miskin memiliki ketimpangan gender lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok masyarakat tidak miskin.

Dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan merupakan dimensi yang paling berpengaruh terhadap indeks ketimpangan gender di Kabupaten Bumiaji. Dengan demikian, salah satu kebijakan untuk menurunkan nilai ketidaksetaraan gender di setiap desa, pemerintah Kota Batu seyogyanya memberikan perhatian khusus pada upaya peningkatan reproduksi ibu dan kesehatan perempuan usia produktif, serta kesamaan akses pendidikan bagi perempuan khususnya pada pendidikan SMA sebagai salah satu bagian dari upaya pemenuhan APM daerah dengan lama masa studi selama 12 tahun.

Tujuan penelitian kedua adalah mengukur 2 (dua) indeks modal sosial melalui pendekatan metoda *Social Network Analysis* (SNA) pada responden yang sama dengan klasifikasi yang sama seperti pada pengukuran tingkat GII di tujuan pertama penelitian. Input data afiliasi berupa keikutsertaan anggota masyarakat pada kelembagaan yang ada, kemudian diukur dengan RoP dan densitas. Temuan perhitungan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin memiliki modal social yang lebih rendah dibandingkan kelompok masyarakat tidak miskin. Dengan kata lain, ikatan sosial diantara anggota masyarakat tidak miskin lebih tinggi dibandingkan dengan ikatan sosial yang terjadi diantara anggota masyarakat miskin. Temuan penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa kualitas modal sosial mempunyai peranan yang signifikan dalam membuka peluang lebih tinggi bagi masyarakat dan diantara anggota masyarakat untuk menjadi sejahtera.

Selanjutnya penelitian ini mencoba untuk mencari hubungan antara tingkat kesetaraan/ ketidaksetaraan gender melalui pengukuran GII dengan tingkat modal sosial atau ikatan sosial antara anggota masyarakat melalui pengukuran RoP dan densitas dengan pendekatan SNA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok anggota masyarakat miskin secara umum memiliki tingkat GII lebih tinggi dan tingkat modal sosial lebih rendah dibandingkan dengan anggota masyarakat dalam kelompok tidak miskin. Ketika kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka nampaknya adalah tidak terelakkan bagi pemerintah/ pemerintah daerah untuk

memberikan perhatian khusus terhadap upaya-upaya kebijakan penurunan ketimpangan/ ketidaksetaraan gender melalui peningkatan ikatan sosial diantara anggota masyarakat secara terintegrasi dan tersinergi. Peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi diantara anggota masyarakat khususnya perempuan bisa dilakukan melalui peningkatan kompetensi pendidikan perempuan melalui jalur lembaga pendidikan formal maupun informal. Selanjutnya, perkuatan ikatan sosial diantara anggota masyarakat bisa diperkuat melalui transformasi informasi/ pengetahuan ataupun sumber daya diantara masyarakat melalui keikutsertaan yang semakin aktif pada kelembagaan formal maupun informal yang ada. Pada akhirnya, ikatan sosial yang kuat tersebut akan semakin membuka peluang perbaikan struktur sosial masyarakat menuju masyarakat yang lebih berdaya guna dan sejahtera, sebagaimana disampaikan oleh [Abdurrahman dan Tusianti \(2021\)](#) dimana keikutsertaan perempuan dalam kelembagaan atau organisasi bermanfaat baik untuk pengembangan kapasitas perempuan dan mengecilkan angka ketimpangan gender. Dengan demikian, penelitian ini mencoba untuk mengusulkan penyempurnaan kebijakan program pengentasan kemiskinan masyarakat melalui integrasi perencanaan pembangunan fisik dan sosial yang sinergis antar berbagai lembaga/ institusi formal maupun informal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A., & Tusianti, E. (2021). Apakah Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia? *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 204-219. doi: <https://doi.org/10.21002/jepi.v21i2.1319>
- Ari, I. R. D., Hariyani, S., & Waloejo, B. S. (2021). Spatial Modelling of Multidimensional Poverty in Rural Area: Evidence from Malang Regency, Indonesia. *Journal of Socioeconomics and Development*, 4(2), 198-211. doi: <https://doi.org/10.31328/jсед.v4i2.2245>
- Ari, I. R. D., Hasyim, A. W., Pratama, B. A., Helmy, M., & Sheilla, M. N. (2017). *Infrastructure and Social Tie: Spatial Model Approach on*

- Understanding Poverty in Malang regency, Indonesia*. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
- Ari, I. R. D., Waloejo, B. S., & Hariyani, S. (2019). Perspective of Social Capital into Poverty Level of the Community, Case Study Bumiaji District, Batu City, Indonesia. *International Journal Of Engineering Research & Technology (IJERT) Volume, 8(8)*, 707-714.
- Badan Pusat Statistika. (2018). Indeks Pembangunan Manusia 2018. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistika Kota Batu. (2019a). Angka Partisipasi Murni. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistika Kota Batu. (2019b). Kecamatan Bumiaji Dalam Angka tahun 2018. Jakarta: BPS.
- Bangun, W. (2021). The Gender Inequality Index: Indonesian Efforts to Enhance Human Development within ASEAN. *Journal of Southwest Jiaotong University, 56(1)*. doi: <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.1.7>
- BAPPENAS. (2016). *Prioritas Nasional: Pembangunan Pendidikan*. Jakarta: BAPPENAS/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in The Creation of Human Capital. *American journal of sociology, 94*, S95-S120.
- Fathy, R. (2019). Modal sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi, 6(1)*, 1-17. doi: <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>
- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Muñoz-Goy, C. (2013). Social Capital in Spain: Are There Gender Inequalities? *European Journal of Government and Economics, 2(1)*, 79-94.
- Ostrom, E., & Ahn, T. (2003). *Foundations of Social Capital*: Edward Elgar Publishing.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*: Simon and schuster.
- Rahman, A. (2013). Women's Empowerment: Concept and Beyond. *Global Journal of Human Social Science Sociology & Culture, 13(6)*, 9-13.
- UN Women. (2014). *United Nations Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women*. Paper presented at the Fourth World Conference on Women. Platform for Action and the Beijing Declaration. Available at: <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf>.
- Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- United Nation Development Programme. (2016). Gender Inequality Index (GII): Human Development Reports UNDP.
- Wasserman, S., & Fraust, K. (1994). *Social Network Analysis: Methods and applications 8*. New York: Cambridge University Press.
- Wulandari, D. (2020). Indeks Kesetaraan Gender Indonesia Masih di peringkat ke-85. <https://mix.co.id/marcomm/news-trend/indeks-kesetaraan-gender-indonesia-masih-di-peringkat-ke-85/>